

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

RENJA

TAHUN 2022



**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan Kabupaten Purwakarta di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan, jembatan dan irigasi yang efisien dan efektif. Konsep pembangunan infrastruktur perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan untuk sektor infrastruktur di seluruh Kabupaten Purwakarta.

Dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala PD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja PD serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip strategis, demokrasi dan partisipasif, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dikemukakan bahwa Rencana Kerja PD sebagai penjabaran Rencana Strategis PD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan diharapkan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur jalan dan pengairan.

Semoga Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwakarta, 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta	3
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Tantangan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	24
3.2 Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	II – 6
2. Tabel 2.2 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2021	II – 17
3. Tabel 2.3 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2021	II – 18
4. Tabel 2.4 Kondisi Jalan Kabupaten Baik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2021	II – 18
5. Tabel 2.5 Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2021	II – 18
6. Tabel 2.6 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2021	II – 20
7. Tabel 2.7 Kondisi Umum Irigasi Tahun 2021	II – 21
8. Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022	III– 25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 Garafik Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2021	II – 19
2. Gambar 2.2 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021	II – 19
3. Gambar 2.3 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021	II – 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja PD sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Perangkat Daerah secara keseluruhan dengan untuk rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi

serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Menyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 16 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati nomor 175 tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati nomor 166 tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan, bidang perencanaan, bidang pengawasan dan pengendalian.

2. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB VII. PENUTUP.

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh Karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 memiliki alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.48.792.294.350,00,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.45.743.364.375,00,- (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 93,75% Adapun uraian capaian kinerja tiap program dan kegiatan Tahun 2021 seperti yang tercantum dalam tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

No.	Perangkat Daerah/Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Porsentase (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	669,021,875	912,647,147	136.42
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	119,021,875	148,380,500	124.67
2	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	550,000,000	764,266,647	138.96
	GAJI DAN TUNJANGAN	6,566,610,482	6,070,325,048	92.44
	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	6,551,010,482	6,054,725,048	92.42
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja	6,551,010,482	6,054,725,048	92.42
	INSETIF PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH			
1	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-
	UANG LEMBUR	15,600,000	15,600,000	100.00
1	Belanja Uang Lembur PNS	9,600,000	9,600,000	100.00
2	Belanja Uang Lembur Non PNS	6,000,000	6,000,000	100.00
	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PURWAKARTA	48,792,294,350	45,743,364,375	93.75
	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	4,115,827,200	3,734,350,749	90.73
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000	1,999,000	99.95
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	260,777,200	121,110,048	46.44
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,000,000	19,260,700	77.04

4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72,000,000	62,100,000	86.25
5	Penyediaan alat tulis kantor	95,000,000	95,000,000	100.00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000	20,000,000	100.00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	45,000,000	45,000,000	100.00
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	20,000,000	20,000,000	100.00
9	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	19,560,000	97.80
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20,000,000	19,511,000	97.56
11	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	801,040,000	647,925,000	80.89
12	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	72,000,000	62,100,000	86.25
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	599,100,000	597,859,000	99.79
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,000,000	198,714,000	99.36
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000	20,000,000	100.00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas PU Binamarga dan Pengairan	200,000,000	199,750,000	99.88
17	Sewa Tempat Gedung/Kantor UPTD Wilayah III	25,000,000	25,000,000	100.00
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	10,800,000	72.00
19	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25,000,000	14,800,000	59.20
20	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	10,000,000	8,950,000	89.50
21	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	15,000,000	10,800,000	72.00

22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD Peralatan dan Perbengkelan	187,846,000	187,736,000	99.94
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah UPTD I	75,000,000	74,926,000	99.90
24	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	206,064,000	182,081,501	88.36
25	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	100.00
26	Penataan Halaman Kantor DPUBMP Purwamekar	200,000,000	199,754,000	99.88
27	Penataan Taman Kantor DPUBM Purwamekar	200,000,000	199,754,000	99.88
28	DED Gedung Kantor DPUBMP Purwamekar	425,000,000	411,770,000	96.89
29	DED Penataan Taman Kantor DPUBMP Purwamekar	100,000,000	98,378,000	98.38
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah UPTD II	150,000,000	149,712,500	99.81
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15,294,277,900	14,460,795,006	94.55
1	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	100,000,000	98,862,500	98.86
2	Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan	200,000,000	189,230,000	94.62
3	Peningkatan Jalan Cikopo - Cilandak	50,000,000	49,610,000	99.22
4	Peningkatan Jalan Cipinang - Cikadu	50,000,000	49,500,000	99.00
5	Peningkatan Jalan Sukamulya - Cisarua	50,000,000	49,197,500	98.40
6	Sosialisasi Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	50,000,000	28,800,000	57.60
7	Peningkatan Jalan Citamiang - Sinargalih	1,000,000,000	837,595,284	83.76
8	Penunjang DAK Bidang Jalan (DAK Tahun 2020)	1,104,941,650	877,722,650	79.44

9	Pembangunan Jembatan (Sukamukti Sukasari) (Sukasari Purwakarta, Kel. Parungbanteng, Kec. Sukasari, Kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	92,325,250	92,325,250	100.00
10	Peningkatan Jalan (Bojong) (Jalan Purnawarman Barat Purwakarta, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	55,365,000	55,365,000	100.00
11	Peningkatan Jalan (Gunungkarung Maniis Purwakarta, Kel. Gunungkarung, Kec. Maniis Kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	77,217,500	77,217,500	100.00
12	Peningkatan Jalan (Cibatu) (Jalan Purnawarman Barat Purwakarta, Kel. Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	102,274,500	102,274,500	100.00
13	Peningkatan Jalan (Darangdan) (Jalan Purnawarman Barat Purwakarta, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	64,550,000	64,550,000	100.00
14	Peningkatan Jalan (Cibatu) (Jalan Purnawarman Barat, Kec. Purwakarta, kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	83,156,500	83,156,500	100.00
15	Peningkatan Jalan (Kiarapedes) (Jalan Purnawarman Barat No. 6A Tlp. 0264-201681, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	39,745,000	39,745,000	100.00
16	Peningkatan Jalan (Wanayasa) (Jalan Purnawarman Barat Purwakarta, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	41,670,000	41,670,000	100.00
17	Peningkatan Jalan (Bungursari) (Jalan Purnawarman Barat Purwakarta, Kel. Nagri Kidul, Kec. Purwakarta kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	55,557,500	55,557,500	100.00
18	Peningkatan Jalan (Kecamatan Maniis) (Jalan Purnawarman Barat Purwakarta, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta) (Banprov Tahun 2020)	77,475,000	77,475,000	100.00
19	Pembangunan Jembatan Darurat dan Peningkatan Jalan (12,000,000,000	11,590,940,822	96.59
	Program pembangunan turap/talud/bronjong	700,000,000	698,077,500	99.73

1	Perencanaan teknis pembangunan turap/talud/bronjong	100,000,000	99,825,000	99.83
2	Pembangunan Talud dan Saluran Di Cibingbin	200,000,000	199,344,500	99.67
3	Pembangunan Talud dan Saluran Di Genggereng	200,000,000	199,398,500	99.70
4	Pembangunan Talud dan Saluran Di Cilembang	200,000,000	199,509,500	99.75
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	10,528,187,250	9,501,465,020	90.25
1	Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100,000,000	96,951,000	96.95
2	Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten Wilayah UPTD IV	800,000,000	641,520,300	80.19
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Wilayah UPTD I	685,560,000	653,150,250	95.27
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Wilayah UPTD II	685,560,000	665,695,250	97.10
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Wilayah UPTD III	685,560,000	666,550,250	97.23
6	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Wilayah UPTD IV	685,560,000	669,086,250	97.60
7	Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah UPTD I	400,000,000	387,563,000	96.89
8	Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah UPTD II	200,000,000	192,797,000	96.40
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah UPTD III	400,000,000	384,299,000	96.07
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah UPTD IV	200,000,000	191,873,000	95.94
11	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Dan Pengaman Jalan	150,150,000	142,539,000	94.93
12	Pemeliharaan Jalan Cilalawi - Tajursindang (DAK 2020)	5,535,797,250	4,809,440,720	86.88

	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	200,000,000	189,805,500	94.90
1	Inspeksi kondisi jalan dan Jembatan	100,000,000	90,372,000	90.37
2	Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kabupaten	100,000,000	99,433,500	99.43
	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	3,200,000,000	3,080,714,500	96.27
1	Penanggulangan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam	200,000,000	193,548,500	96.77
2	Pengadaan Material Cadangan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD I	400,000,000	380,139,000	95.03
3	Pengadaan Material Cadangan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD II	400,000,000	381,062,000	95.27
4	Pengadaan Material Cadangan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD III	400,000,000	379,331,000	94.83
5	Pengadaan Material Cadangan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD IV	400,000,000	381,770,000	95.44
6	Penanggulangan Darurat jalan dan Jembatan Wilayah UPTD I	350,000,000	339,715,000	97.06
7	Penanggulangan Darurat jalan dan Jembatan Wilayah UPTD II	350,000,000	341,391,000	97.54
8	Penanggulangan Darurat jalan dan Jembatan Wilayah UPTD III	350,000,000	343,001,000	98.00
9	Penanggulangan Darurat jalan dan Jembatan Wilayah UPTD IV	350,000,000	340,757,000	97.36
	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	100,000,000	96,842,500	96.84
1	Sistem Informasi Manajemen Aset Jalan Kabupaten Purwakarta (SI MASJA)	100,000,000	96,842,500	96.84
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	945,000,000	880,828,000	93.21
1	Peningkatan Kinerja Pembantu Operator Alat Berat dan Tenaga Laboratorium Teknik	845,000,000	784,080,000	92.79

2	Pengadaan Alat Survey Jalan dan Jembatan	100,000,000	96,748,000	96.75
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	9,134,002,000	8,712,612,500	95.39
1	Perencanaan teknis Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	100,000,000	99,874,500	99.87
2	Pemeliharaan Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD I	100,000,000	99,635,500	99.64
3	Pemeliharaan Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD II	100,000,000	99,727,000	99.73
4	Pemeliharaan Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD III	100,000,000	99,599,500	99.60
5	Pemeliharaan Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD IV	100,000,000	99,518,000	99.52
6	Penanggulangan Tanggap Darurat Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD I	300,000,000	299,285,500	99.76
7	Penanggulangan Tanggap Darurat Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD II	300,000,000	298,175,000	99.39
8	Penanggulangan Tanggap Darurat Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD III	300,000,000	298,910,500	99.64
9	Penanggulangan Tanggap Darurat Bangunan dan Saluran Irigasi Wilayah UPTD IV	300,000,000	298,363,500	99.45
10	Penunjang DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Penugasan Tahun 2020)	334,002,000	316,359,000	94.72
11	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Saluran Irigasi DI Citukang (DAK 2020)	360,000,000	341,924,000	94.98
12	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI Cigandasoli (DAK 2020)	720,000,000	691,071,000	95.98
13	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI Garokgek 2 (DAK 2020)	720,000,000	687,944,000	95.55

14	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI Cibodas (DAK 2020)	420,000,000	392,384,000	93.42
15	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI Citaraje (DAK 2020)	1,200,000,000	1,101,238,000	91.77
16	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI Cilembang (DAK 2020)	1,200,000,000	1,116,498,000	93.04
17	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI Nanggewer (DAK 2020)	1,200,000,000	1,134,152,000	94.51
18	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI Cikembang (DAK 2020)	720,000,000	684,420,000	95.06
19	Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Cipanas Leuweung	200,000,000	199,439,500	99.72
20	Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Cibueuk	160,000,000	159,595,000	99.75
21	Pemeliharaan Bendung Wilayah UPTD I	50,000,000	48,999,000	98.00
22	Pemeliharaan Bendung Wilayah UPTD II	50,000,000	48,480,000	96.96
23	Pemeliharaan Bendung Wilayah UPTD III	50,000,000	49,040,000	98.08
24	Pemeliharaan Bendung Wilayah UPTD IV	50,000,000	47,980,000	95.96
	Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan	1,750,000,000	1,687,047,300	96.40
1	Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Layang Jalan Kemuning - Ipik Gandamanah	200,000,000	192,467,500	96.23
2	Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Dalam	250,000,000	236,532,500	94.61
3	Penelitian Tanah Ruas Jalan Kabupaten	200,000,000	191,860,650	95.93

4	Penelitian Tanah Jalan Rawan Bencana	300,000,000	288,963,150	96.32
5	Penelitian dan Pemeriksaan Kontruksi Jembatan	300,000,000	291,965,000	97.32
6	Penataan Fungsi dan Status Jalan Kabupaten	100,000,000	95,108,500	95.11
7	Penyusunan Leger Jalan Kabupaten	100,000,000	99,012,500	99.01
8	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Darurat Cihérang Buntu	100,000,000	98,462,500	98.46
9	Study Kelayakan Jalan Tembus Pasir Munjul-Sukajadi	200,000,000	192,675,000	96.34
	Program Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi	700,000,000	689,872,000	98.55
1	Penyempurnaan DED Bendung DI Cikadu	100,000,000	99,537,000	99.54
2	Pengadaan Alat Survey Pengairan	200,000,000	193,740,000	96.87
3	Kajian Kinerja Jaringan Irigasi Kabupaten di Wilayah Kecamatan Wanayasa	100,000,000	99,318,000	99.32
4	Kajian Kinerja Jaringan Irigasi Kabupaten di Wilayah Kecamatan Pondoksalam	100,000,000	98,744,500	98.74
5	Editing Area Daerah Irigasi Kabupaten di Wilayah Kecamatan Bojong	100,000,000	99,065,000	99.07
6	Studi Potensi dan Pengembangan Wilayah Irigasi di Kabupaten Purwakarta (Lanjutan)	100,000,000	99,467,500	99.47
	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1,075,000,000	1,029,114,500	95.73
1	Pemeliharaan Gorong - Gorong Wilayah UPTD I	200,000,000	189,256,000	94.63

2	Pemeliharaan Gorong - Gorong Wilayah UPTD II	100,000,000	94,859,000	94.86
3	Pemeliharaan Gorong - Gorong Wilayah UPTD III	100,000,000	97,003,000	97.00
4	Pemeliharaan Gorong - Gorong Wilayah UPTD IV	100,000,000	95,758,000	95.76
5	Pemeliharaan Trotoar Wilayah UPTD I	100,000,000	94,450,000	94.45
6	Pemeliharaan Trotoar Wilayah UPTD II	100,000,000	94,638,000	94.64
7	Pemeliharaan Trotoar Wilayah UPTD III	100,000,000	94,778,000	94.78
8	Pemeliharaan Trotoar dan Saluran Jalan Cianting - Plered	200,000,000	195,287,500	97.64
9	Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong -gorong	75,000,000	73,085,000	97.45
	Program Pembangunan Jaringan Irigasi	450,000,000	435,773,300	96.84
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Irigasi	100,000,000	99,343,800	99.34
2	Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi DI Citengah 1	100,000,000	98,471,000	98.47
3	Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi DI Ciloji	100,000,000	99,658,500	99.66
4	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Irigasi	50,000,000	38,684,500	77.37
5	Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi DI Ciseuti	100,000,000	99,615,500	99.62
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Irigasi	100,000,000	99,509,000	99.51

1	Pemutahiran Data Base Jaringan Irigasi	50,000,000	49,696,500	99.39
2	Sistem Informasi Perencanaan Jaringan Irigasi	50,000,000	49,812,500	99.63
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan	200,000,000	148,038,500	74.02
1	Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan	25,000,000	25,000,000	100.00
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengairan	25,000,000	22,060,000	88.24
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebinamargaan dan Pengairan	50,000,000	49,998,500	100.00
4	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan	50,000,000	2,500,000	5.00
5	Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	50,000,000	48,480,000	96.96
	Program Pengujian Bahan dan Alat Laboratorium Teknik	300,000,000	298,518,500	99.51
1	Pengadaan Peralatan laboratorium Teknik	100,000,000	99,636,000	99.64
2	Pemeliharaan Alat Uji Bahan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	100,000,000	99,302,000	99.30
3	Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan	100,000,000	99,580,500	99.58

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari tabel realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 diatas, terlihat bahwa penyerapan anggaran setelah sebesar 93,75% terhadap total anggaran setelah perubahan tahun 2020 ada sisa anggaran yang tidak terserap tersebut diantaranya:

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terserap Sebesar 46.44%, Tumpang tindih dengan kegiatan pemeliharaan berkala rutin kantor DPUBMP;

2. Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Terserap Sebesar 5%, Keterbatasan sumber daya manusia;

Dari program dan kegiatan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020, setelah dilakukan analisis maka didapat bahwa pada akhir tahun 2020, jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 640,608 Km atau sebesar 87,88% dari total panjang Jalan Kabupaten sepanjang 728,924 Km. dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Rincian pencapaian kegiatan kebinamargaan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2020

NO	TIPE PERMUKAAN	JUMLAH
1.	Pembangunan Jembatan	1 Buah
2.	Pembangunan Jalan	- KM
3.	Peningkatan Jalan	2,97 KM
4.	Pemeliharaan Jalan	51,51 KM
5.	Pemeliharaan Jembatan	2 Titik
6.	Pemeliharaan Gorong-Gorong	33,50 m
7.	Pemeliharaan Trotoar	-
8.	Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan	4 Lokasi

Secara keseluruhan, dengan terselesaikannya program dan kegiatan yang tertuang dalam penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2020, kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi jalan mantap adalah sepanjang 640.608 kilometer atau sebesar 87,88% dari total panjang jalan kabupaten 728,924 KM. Untuk mengetahui jenis dan kondisi jalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, seperti diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.3 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2020

No.	TIPE PERMUKAAN	PANJANG (KM)		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Jalan Aspal (hotmix)	555,364 (76,19%)	571,714 (78,43%)	532,161 (73,01%)
2.	Juuualan Aspal (Lapen)	10,715 (1,47%)	-	-

3.	Jalan Beton	134,71 (18,48%)	135,825 (18,63%)	136,902 (18,78%)
4.	Jalan Batu/Kerikil	28,135 (3,86%)	21,385 (2,93%)	55,37 (7,60%)
5.	Jalan Tanah	-	-	4,486 (0,62%)
JUMLAH		728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)

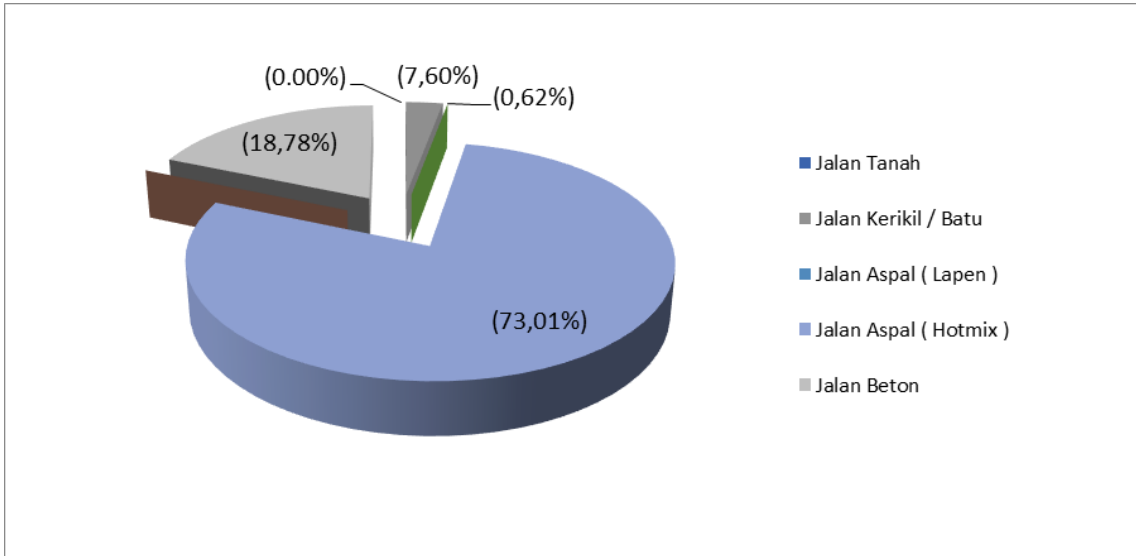
Tabel 2.4 Kondisi Jalan Kabupaten Baik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2020

No.	KONDISI JALAN	PANJANG (KM)		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Baik	494,667 (67,86%)	499,477 (68,52%)	508,554 (69,77%)
2.	Sedang	118,385 (16,24%)	140,482 (19,27%)	132,054 (18,12%)
3.	Rusak	97,657 (13,40%)	83,015 (11,38%)	32,440 (4,45%)
4.	Rusak Berat	18,215 (2,50%)	5,950 (0,81%)	55,876 (7,67%)
JUMLAH		728,924	728,924	728,924

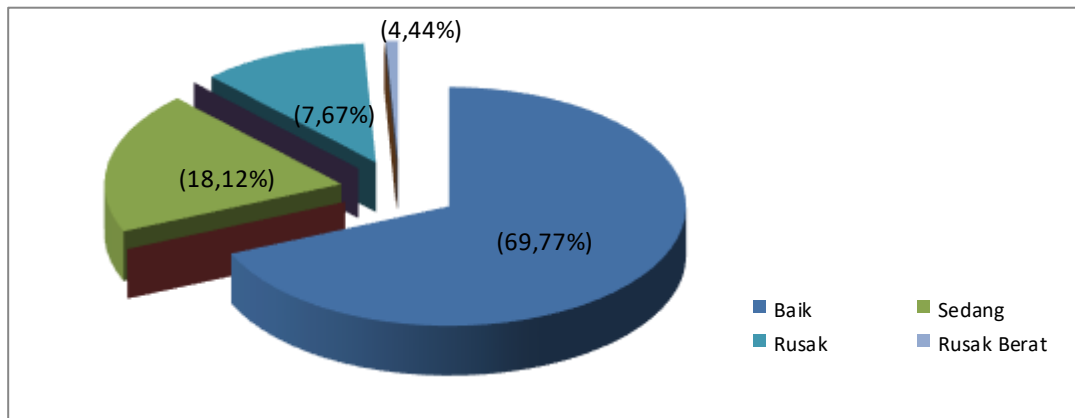
Tabel 2.5 Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2020

No.	KONDISI JALAN	PANJANG (KM)		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Mantap	613,052 (84,10%)	639,959 (87,80%)	640,608 (87,88%)
2.	Kurang Mantap	97,657 (13,40%)	83,015 (11,39%)	32,440 (4,45%)
3.	Kritis	18,215 (2,50%)	5,950 (0,82%)	55,876 (7,67%)
JUMLAH		728,924	728,924	728,924

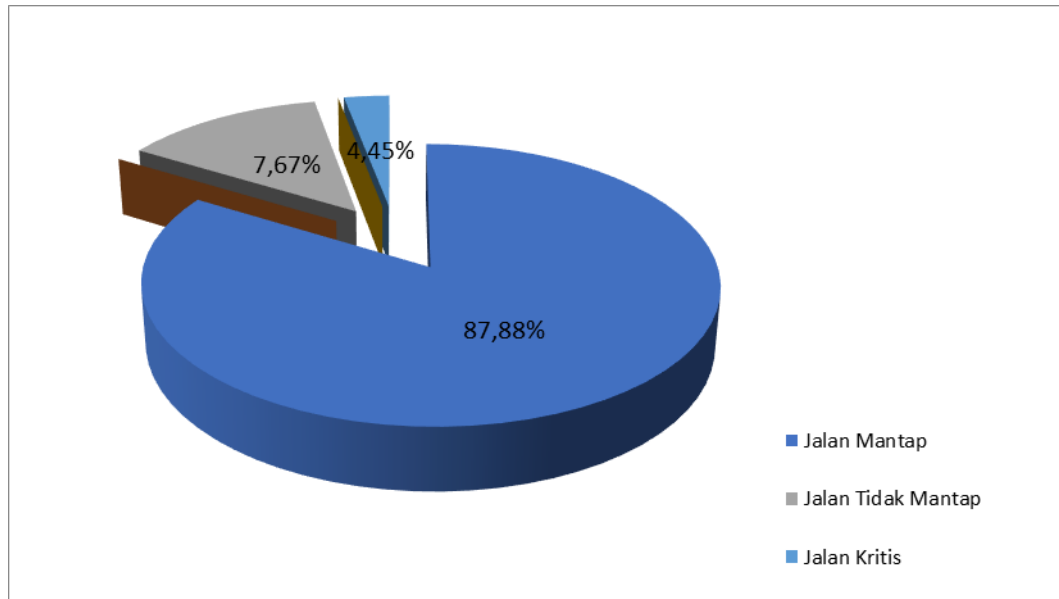
Grafik 2.1 Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2020



Grafik 2.2 Kondisi Jalan Kabupaten Baik Tahun 2020



Grafik 2.3 Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2020



Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 87,88%.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dalam rangka memenuhi tersedianya jaringan irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00 Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 5.974,62Ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 82,18% terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Tapkin 2020. Untuk melihat capaian bidang pengairan dan kondisi irigasi pada akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2020

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	4129,22 m
2.	Rehabilitasi Bendung	3
3.	Bangunan Box Bagi	-
4.	Free Intake	-
5.	Krib Bronjong	116,18 m

Tabel 2.7 Kondisi Umum Irigasi Tahun 2020

NO	KONDISI IRIGASI	HEKTAR	PROSENTASE (%)
1.	Baik	5974,62Ha	82,18%
2.	Sedang	853,08Ha	11,73%
3.	Rusak Berat	442,29Ha	6,08%
JUMLAH		7.270,00 Ha	100%

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa prosentase kondisi irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 82,18%.

2.3 Tantangan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur tersebut dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan. Selain itu, isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius adalah pentingnya seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta untuk terus meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima. Untuk itu perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya tantangan dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

A. Bidang Bina Marga

1. Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga

- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- Peningkatan daya dukung, kapasitas, maupun kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- Pembangunan jalan dan jembatan baru untuk meningkatkan aksesibilitas;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara jalan dan jembatan.
- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme para perencanaan dibidang perencanaan jalan dan jembatan;
- Peningkatan kualitas SDM dibidang Perencanaan jalan dan jembatan;

2. Isu Strategis Bidang Bina Marga

- Jaringan jalan strategis masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah, khususnya jalan lingkaran timur dan jalan lingkaran barat Kabupaten Purwakarta;
- Masalah pembebasan lahan yang sering terjadi menjadi hambatan bagi pembangunan jalan;
- Meningkatkan mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah keterbatasan alokasi anggaran untuk penanganan jaringan jalan;
- Beban Kendaraan berlebih masih sering terjadi di ruas jalan kabupaten;
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dan jembatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi pemantapan jaringan jalan kabupaten;

B. Bidang Bina Pengairan

1. Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga Dan Pengairan

- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme di bidang penyelenggaraan pengairan;
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan jaringan irigasi;
- Menjaga kontinuitas pemenuhan debit minimal untuk seluruh daerah irigasi tersier;
- Menjaga kelebihan penggunaan air dengan cara menjaga tingkat pemenuhan debit minimal untuk daerah-daerah irigasi tersier;
- Masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.

- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme para perencanaan dibidang pengairan;
- Peningkatan kualitas SDM dibidang Perencanaan irigasi;

2. Isu Strategis Bidang Pengairan

- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, yang diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain disebabkan oleh umur kontruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur irigasi yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor;
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air akibat berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas penampungan air baik alamiah maupun buatan;
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan jaringan irigasi untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.

C. Bidang Bina Program dan Pengendalian

1. Tantangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme para pengawas dibidang pengawasan jalan, jembatan dan pengairan;
- Peningkatan kualitas SDM dibidang Pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
- Semakin berkurangnya tenaga pengawas lapangan karena banyak yang telah memasuki masa purna bakti pensiun.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 dalam rencana Program Kegiatan Prioritas Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta;
- e. Mewujudkan efisien dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.

3.2 Program dan Kegiatan

Program Kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun 2021 seperti yang terlihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33,008,940,228
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	510,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,500,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	12,500,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,990,194,098
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,835,394,098
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64,800,000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,500,000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,500,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,000,000
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10,000,000
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40,000,000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10,000,000

2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	40,000,000
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10,000,000
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	10,000,000
3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	10,000,000
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,260,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	800,000,000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,000,000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50,000,000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,310,000,000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,000,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200,000,000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000
6	Penyediaan Bahan/Material	200,000,000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,000,000

10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,831,824,114
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,000,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000,000
3	Pengadaan Alat Besar	1,631,824,114
4	Pengadaan Mebel	400,000,000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600,000,000
6	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	600,000,000
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,500,000,000
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400,000,000
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,270,422,016
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,000,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,057,422,016
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,756,500,000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228,500,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	200,000,000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600,000,000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,000,000,000
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12,935,592,903

	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100,000,000
2	Pembangunan Bendungan	100,000,000
3	Rehabilitasi Tanggul Sungai	100,000,000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12,635,592,903
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	799,999,802
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	99,999,978
3	Pembangunan Bendung Irigasi	99,999,588
4	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	500,000,000
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9,486,219,511
6	Rehabilitasi Bendung Irigasi	400,000,000
7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	800,000,103
8	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	200,000,000
9	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	349,373,921
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,075,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,075,000,000
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100,000,000
2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	425,000,000
3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	100,000,000
4	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	200,000,000
5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000
6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	950,000,000
7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	800,000,000
8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000

9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	800,000,000
10	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	100,000,000
11	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	100,000,000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	22,000,000,000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	22,000,000,000
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4,000,000,000
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000
3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	2,000,000,000
4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000
5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000
6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	2,000,000,000
7	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	2,000,000,000
8	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	2,000,000,000
9	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000
10	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	14,000,000,000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	14,000,000,000
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1,000,000,000
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1,000,000,000
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5,000,000,000
4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5,000,000,000
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	1,000,000,000

6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1,000,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48,724,537,836
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	48,724,537,836
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4,000,000,000
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	162,000,000
3	Pengelolaan Leger Jalan	162,000,000
4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	162,000,000
5	Pembangunan Jalan	9,000,000,000
6	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	98,600,000
7	Rekonstruksi Jalan	1,997,668,644
8	Rehabilitasi Jalan	202,950,000
9	Pemeliharaan Berkala Jalan	6,000,000,000
10	Pemeliharaan Rutin Jalan	10,000,000,000
11	Pembangunan Jembatan	10,000,000,000
12	Pelebaran Jembatan	1,000,000,000
13	Rehabilitasi Jembatan	1,000,000,000
14	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,000,000,000
15	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1,000,000,000
16	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1,716,219,192
17	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	233,280,000
18	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	989,820,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2,604,557,631
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1,504,000,000
1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	504,000,000
2	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	200,000,000

3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200,000,000
4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200,000,000
5	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	200,000,000
6	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200,000,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000
1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100,000,000
2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100,000,000
3	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	100,000,000
4	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	100,000,000
5	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	100,000,000
6	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	100,000,000
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	500,557,631
1	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	100,000,000
2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	100,000,000
3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	100,000,000
4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	100,000,000
5	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	100,557,631
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,976,750,000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2,365,200,000
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1,620,000,000
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	745,200,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	368,550,000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	44,550,000

2	Sistem Informasi Penataan Ruang	324,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	243,000,000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	162,000,000
2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	81,000,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5,040,500,000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	40,500,000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,500,000
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,500,000
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5,000,000,000
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000,000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000,000
		145,365,878,598

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai persepsi tentang rencana kerja Tahun 2022 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih terkoodinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran dan tujuan yang lebih ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Semoga Renja yang telah disusun dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta khususnya di bidang kebinamargaan dan pengairan.